



KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MOTTO DAERAH “BERSUJUD” DI KABUPATEN TANAH BUMBU KALIMANTAN SELATAN

Rusdiansyah

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik ULM Banjarmasin

Email: rusdiansyah@ulm.ac.id

Abstract

The presence of a motto is not just a word sweetener. But it must have meaning that can be implemented in a concrete form. The values of Islamic education contained in the prostration motto can be implemented in the form of policies by the government as the formulator of the motto. So, it becomes a necessity if the motto "prostrate" is applied by the community, it will be able to bring to the regional development goals. This study aims to describe the policy of Islamic education based on the prostration motto in Tanah Bumbu Regency, as well as the obstacles and carrying capacity of the government in implementing Islamic education policy based on the prostration area motto. The method used by researchers is descriptive qualitative research with a policy study approach. Collecting data with direct interview techniques to respondents, namely Dr. Zairullah Azhar Regent of Tanah Bumbu Regency for the first period (2003-2010), as well as people involved in the policy as participants and the local community as a crosscheck who felt directly the impact of the policy. The results of this study indicate that the policy of Islamic education based on the prostration area motto begins with the formulation of the concept of the prostration area motto by Dr. Zairullah Azhar, prostration is an abbreviation of the values of Islamic education that is clean, thankful, honest, and peaceful. The implementation of policies based on this prostrate values includes Divine management, the obligation to pray in congregation for the ASN (State Civil Apparatus), the midday prayer in congregation, the Al Qur'an program (before work), the Duha prayer in the morning, grave pilgrimage as a strategy for not corruption, Islamic education in the non-formal form of recitation of the majelis ta'lim. However, this policy does not touch on formal institutions, and society at large. Some people's acceptance of these policies follows and some does not. Because the policy can only be felt directly by the ASN / PNS. The policy of Islamic education based on prostration motto has not been able to be implemented in general in all fields. So that finally led to a conclusion that the policy of Islamic education based on the prostrate motto has not been fully implemented properly.

Keyword: *policy, Islamic education, motto, prostrate.*

Abstrak

Kehadiran sebuah motto bukan hanya sebagai pemanis kata. Tetapi haruslah memiliki makna yang dapat diimplementasikan dalam bentuk yang konkret. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada motto bersujud dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan oleh pemerintah sebagai perumus dari motto tersebut. Sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika motto “bersujud” tersebut diterapkan oleh masyarakat, maka akan mampu membawa kepada tujuan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan pendidikan Islam berbasis motto daerah bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu, serta hambatan dan daya dukung pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam berdasarkan motto daerah bersujud. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian studi kebijakan. Pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung kepada responden yaitu dr. Zairullah Azhar Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode pertama (2003-2010), serta orang-orang yang terlibat dalam kebijakan sebagai partisipan dan masyarakat setempat sebagai croschek yang merasakan secara langsung dampak kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam berbasis motto daerah bersujud diawali dengan perumusan konsep motto daerah bersujud oleh dr. Zairullah Azhar, bersujud merupakan singkatan dari nilai-nilai pendidikan Islam yakni bersih, syukur, jujur dan damai. Implementasi kebijakan yang dilandasi dengan nilai bersujud ini antara lain manajemen Ilahiyah, kewajiban shalat berjama’ah bagi ASN (Aparatur Sipil Negara), shalat shubuh berjama’ah, program tadarus Al-Qur’an (sebelum bekerja), shalat sunat dhuha di pagi hari, ziarah kubur sebagai strategi untuk tidak korupsi, pendidikan Islam dalam bentuk non-formal berupa pengajian majelis ta’lim. Akan tetapi kebijakan ini tidak menyentuh di lembaga formal, dan masyarakat secara luas. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan ini sebagian mengikuti dan sebagian tidak. Karena kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan secara langsung oleh ASN/PNS. Kebijakan pendidikan Islam berbasis motto bersujud belum mampu diimplementasikan secara umum di semua bidang. Sehingga akhirnya menimbulkan sebuah kesimpulan bahwa kebijakan pendidikan Islam berbasis motto daerah bersujud belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Kata kunci: kebijakan, pendidikan Islam, motto, bersujud.

A. Pendahuluan

Realita pendidikan Islam di Indonesia pada umumnya memang diakui berhadapan arus globalisasi yang pada akhirnya menimbulkan persoalan. Amin Abdullah menegaskan, bahwa pendidikan Islam sendiri masih menghadapi persoalan-persoalan klasik yang belum terpecahkan sampai sekarang. Berbagai persoalan yang terjadi seperti manajemen, ketenagaan, sumber dana, inprastruktur dan kurikulum. Dalam konteks inilah berbagai problematika yang ada tentu saja menjadi bahasan penting dalam studi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya pendidikan di Indonesia merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan oleh Negara, dalam rangka mewujudkan hak menentukan eksistensi nasional bangsanya dalam bidang pendidikan.

Menurut Kamrani Buseri, hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia (muda) untuk menjadi manusia. Ini pengertian umum bagi pendidikan Islam adalah

memanusiakan manusia (muda) menjadi manusia menurut konsep Islam. Manusia memandang pendidikan sebagai sebuah kegiatan yang mulia yang mengarahkan manusia pada nilai-nilai yang memanusiakan dari suatu perbuatan dan praktik serta mengundang implikasi pemahaman akan arah dan tujuannya.

Pendidikan Islam itu tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari dunia pendidikan secara universal. Sebagaimana diungkapkan Kamrani Buseri, di Indonesia pendidikan Islam bersentuhan secara langsung dengan sistem pendidikan nasional dengan segenap implementasinya. Sistem sosial kemasyarakatan, eksistensi budaya, aliran dan faham keagamaan, kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi informasi memberikan dampak secara sosiologis dan filosofis terhadap pendidikan Islam. Bahkan, dalam permasalahan pendidikan tidak mungkin bisa pula dipisahkan dengan politik. Sebab bagaimanapun juga kebijakan pendidikan akan dipengaruhi oleh keputusan politik. Begitupula dengan kurikulum. Kurikulum memegang peranan penting bagi dunia pendidikan saat ini. Namun, kurikulum tidak akan berjalan dengan baik jika hanya diajarkan di sekolah oleh guru tanpa melalui keteladanan dirinya, baik dalam lingkup sekolah maupun di luar lingkungan sekolah.

Manipulasi pendidikan agama sebagaimana dikemukakan di atas harus dilandasi pada sebuah tujuan secara real. Untuk mewujudkannya, negara merupakan instrument utama dalam menjamin warganya mendapatkan akses pendidikan. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan pendidikan bagi pribadi dan masyarakat. Diskursus kebijakan otonomi pendidikan menjadi trend seiring bergulirnya konsep desentralisasi-otonomi daerah. Menurut Ni'matul Huda, pemerintahan yang terlalu sentralistik terbukti kurang efektif melayani kepentingan-kepentingan daerah. Produk perundang-undangan/aturan disusun oleh pemerintah pusat dan daerah belum dapat menjawab dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan. Konseptualisasi ini berdampak pada semakin terbukanya berbagai kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendesain kebijakan pendidikan dan melaksanakannya sesuai kebutuhan sendiri. Salah satu yang usaha tersebut adalah dengan membuat konsep pendidikan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan daerah dengan mengangkat kearifan lokal.

Pada prinsipnya, pelaksanaan otonomi daerah dilakukan harus sesuai dengan konstitusi negara, adanya kerjasama antara pemerintah pusat dengan stakeholder di daerah dalam melaksanakan kebijakan pendidikan. Undang-undang telah mengatur pula tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kebijakan pendidikan. Sehingga tidak ada kebijakan di daerah yang melampaui kebijakan pusat.

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan berhasil bila didasarkan atas konsep yang jelas, analisis permasalahannya secara utuh dan teknisnya dilaksanakan secara sinergis. Aspek-aspek ideologis (filosofis, tata nilai) dan empiris (kondisi pendidikan, lingkungan nasional dan lingkungan global) menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Sejalan dengan hal tersebut, Tilaar menyebutkan bahwa kebijakan di bidang pendidikan yang disusun harus sejalan dengan kepentingan publik. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa di bidang pendidikan sebagai salah satu dari tujuan pembangunan nasional. Kebijakan pendidikan ini menyangkut dari aspek anggaran, kurikulum pendidikan, kesejahteraan dan menyangkut sarana prasarana pendidikan”.

Secara pragmatis, kebijakan dibuat atas dasar argumen yang berasal dari motivasi, kasus paralel dan analogi. Pembeneran dalam suatu argumen dan motivasi menghasilkan kekuatan pendorong kebijakan itu dilaksanakan. Penelitian ini akan dapat melihat polarisasi kebijakan daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan Islam berbasis motto daerah di Kabupaten Tanah Bumbu. Artinya bahwa motto daerah merupakan argumen pemerintah, sekaligus merupakan alat pembeneran yang dapat memberikan motivasi dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut disampaikan kepada element masyarakat daerah untuk dilaksanakan.

Sebenarnya motto atau semboyan telah banyak digunakan dalam masyarakat, terutama sebuah organisasi, perusahaan, kegiatan dan dalam pemerintahan. Dalam hal semboyan kota atau kabupaten kalimat pendek ini (biasanya dalam Bahasa Sanskerta atau bahasa daerah setempat) mengacu kepada suara makna tertentu yang memberikan semangat sekaligus ciri khas pada daerah tersebut. Provinsi Kalimantan Selatan terdapat motto daerah berupa Waja Sampai Kaputing, berdasarkan penelusuran sejarah motto tersebut merupakan ungkapan Pangeran Antasari seorang Pahlawan Nasional Kalimantan Selatan (1797-1862). Jumlah daerah yang terdiri dari 11 kabupaten dan 2 kotamadya terdapat di Kalimantan Selatan juga memiliki motto dan semboyan daerah masing-masing. Dari informasi yang penulis dapatkan, motto ini berasal dari bahasa daerah, yang merupakan bagian dari kearifan lokal, yaitu bahasa Banjar. Kecuali tiga daerah yaitu, Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu.

Tata nilai yang terdapat pada motto daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah bersujud. Jika diamati secara seksama, motto Bersujud merupakan hasil dari prosedur, proses dan produk. Dalam konteks pendidikan, Bersujud merupakan nilai-nilai akhlak yang secara prosedural hukum dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Motto daerah ini diimplementasikan secara resmi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Lambang/Logo Kabupaten Tanah Bumbu yang bunyinya:

“Motto daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Slogan “BERSUJUD” mempunyai makna Bersih, Syukur, Jujur dan Damai, yang bermakna dalam usaha mewujudkan cita-cita luhur masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu selalu diringi kebersihan hati, selalu dalam kejujuran dan penuh rasa syukur dengan diiringi hati yang damai dan selalu berusaha sekuat tenaga dalam kedamaian, menciptakan kesuburan pertumbuhan pembangunan di segala bidang”.

Proses perumusannya tentu dengan berbagai pertimbangan dan argumen politik yang tidak bisa dipisahkan dengan historis pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu saat itu. Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, kepemimpinan di Tanah Bumbu dalam mengimpelentasikan kebijakan pendidikan Islam terbagi pada tiga periode. Pertama masa awal kepemimpinan Bupati Zairullah Azhar (2003-2010), kedua masa kepemimpinan H. Mardani (2010-2018), dan yang ketiga masa kepemimpinan H. Sudiannoor (2018-sekarang).

Masa awal perumusan motto bersujud oleh Bupati pertama diimplementasikan dalam berbagai kebijakan. Proses penanaman nilai-nilai bersujud dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat. Diantaranya menerapkan sistem kepermerintahan melalui Manajemen Ilahiah, mengadakan kajian/majelis ta’lim di instansi pemerintahan dan masyarakat, mendirikan Istana Anak Yatim tempat penampungan anak-anak yatim dan dhu’afa, merubah nama-nama desa yang belum islami menjadi islami.

Pergantian kepemimpinan dimasa Bupati berikutnya terjadi perubahan kebijakan. Program-program yang berhubungan dengan pendidikan Islam pada kepemimpinan sebelumnya sebagian dihilangkan, seperti manajemen Ilahiyah dan kewajiban ASN mengikuti kajian/majelis ta’lim sebelum jam kerja dimulai. Tetapi pada masa ini lahir Perda. Pendidikan Al Quran. Sekarang ini kepemimpinan berada pada Bupati yang ketiga. Dari observasi awal yang penulis lakukan, kepala daerah sekarang membuat suatu kebijakan yakni program satu desa satu hafizh yang akan diperkuat dengan lahirnya perda.

Tujuan motto/semboyan daerah dirumuskan seharusnya menjadi ruh bagi pengembangan dan pembangunan daerah tersebut. Terlepas adanya pengaruh politik, budaya dan lain sebagainya. Nilai-nilai akhlak berupa bersih, syukur, jujur, dan damai yang terdapat pada bersujud dapat diimplementasikan dalam pendidikan Islam. Sehingga implementasi kebijakan pendidikan Islam di Tanah Bumbu yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih bermoral dan bermartabat dalam pembangunan dapat tercapai.

Kajian akademik dalam bidang kebijakan pendidikan telah banyak dilakukan. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan pendidikan Islam yang dalam membangun daerah yang didasarkan pada motto daerah. Kesimpulan sementara yang dapat penulis kemukakan bahwa kebijakan pendidikan Islam berbasis motto daerah bersujud belum sepenuhnya dapat terimplementasi. Khususnya bagi para anak didik di lembaga-lembaga sekolah baik formal maupun non-formal. Masyarakat lokal belum dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terdapat pada motto bersujud. keberadaan motto hanyalah sebagai “hiasan” kata-kata yang masih jauh dari realisasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Dengan menggunakan studi kebijakan atau dapat juga dikatakan dengan metode penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan (*policy research methods*) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan menjadi efektif dan efisien. Adapun sifat penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analitis yaitu pengamatan objektif partisipatif terhadap suatu fenomena dengan menggambarkan situasi yang terjadi dan menganalisis data yang didapatkan. Dalam Terminologi Husserl dan Heidegger, yang dikutip Noeng Muhajir terminologi fenomenologis dianggap sebagai penyingkapan makna dari fenomena yang ada dan hadir, sebagai sebuah tindakan yang terkandung dan tersirat di dalamnya. Pemaknaan terhadap fenomena dilakukan berdasarkan pendekatan fenomenologik-heurmenetik. Hal tersebut setelah memperhatikan ekspresi manusia dalam kehidupan berhubungan dengan dunia dan pemikiran. Pemahaman terhadap ekspresi atau tindakannya berarti memahami dunia pemikirannya. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J. Melong bahwa prosedur penelitian dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dari penelitian kebijakan ini adalah valid, reliabel dan objektif. Selanjutnya data menghasilkan beberapa alternatif rekomendasi tindakan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan. Peneliti menekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data yang dipilih peneliti diambil yang memiliki keterkaitan langsung dari perumusan

kebijakan pendidikan Islam berbasis Motto daerah Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung kepada responden yaitu dr. Zairullah Azhar Bupati Kabupaten Tanah Bumbu periode pertama (2003-2010), serta orang-orang yang terlibat dalam kebijakan sebagai partisipan dan masyarakat setempat sebagai *crosscheck* yang merasakan secara langsung dampak kebijakan tersebut.

Model yang digunakan dalam analisis kebijakan ini adalah *Descriptive and Normatif models*. Kedua model ini sangat relevan dengan kajian yang diangkat yaitu menjelaskan atau memprediksikan sebab-sebab dan konsekuensi dari sebuah kebijakan. Kemudian menjelaskan makna terdalam yang berhubungan dengan nilai-nilai apakah suatu kebijakan bermanfaat atau tidak. Kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian meliputi: mereduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan, dan melaksanakan verifikasi. Reduksi data adalah membuat laporan data dari lapangan dan laporan tersebut direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilih data sesuai dengan masalah penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang mendalam pada tiga keluarga yang dituntun masalah penelitian dan tujuan penelitian, maka reduksi data dilakukan untuk mengasah dan mempertajam fenomena yang terlihat nampak. Menarik sebuah kesimpulan dan verifikasi data dilakukan sejak data awal diperoleh peneliti, namun penarikan kesimpulan bersifat temporal. Menarik dan memverifikasi data terus dilakukan sepanjang penelitian berjalan. Data diinterpretasikan berdasarkan data yang ada dalam penghayatan peneliti yang merupakan penghayatan subjek penelitian, untuk dipergunakan dalam menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian. Interpretasi data berdasarkan sudut penghayatan subjek penelitian untuk menyingkap makna-makna yang tersembunyi dari fenomena-fenomena yang ditampilkan.

Berdasarkan deskripsi dan interpretasi data di atas, dianalisis implementasi kebijakan pendidikan Islam yang berbasis pada motto daerah bersujud. Dari hasil penelitian ini akan terjawab dalam bentuk deskripsi mengenai munculnya motto daerah Bersujud di Kabupaten Tanah Bumbu, perumusan motto daerah Bersujud berdasarkan historis/sejarah di Kabupaten Tanah Bumbu, implementasi kebijakan motto daerah bersujud di Kab. Tanah Bumbu melalui tiga kepemimpinan kepala daerah, hambatan dan daya dukung pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan Islam berdasarkan motto daerah bersujud, analisis makna terdalam dari kebijakan pendidikan Islam melalui motto daerah.

C. Hasil Penelitian dan Diskusi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zairullah Diimplementasikan dalam bentuk konsep manajemen Ilahiyah, Diwajibkan shalat berjama'ah bagi ASN Shalat shubuh berjama'ah, Program tadarus Al Quran (sebelum bekerja), Shalat sunat dhuha di pagi hari, Ziarah kubur sebagai strategi untuk tidak korupsi Bersama masyarakat mengadakan pengajian majelis ta'lim setiap malam jum'at dan malam sabtu yang pengajarnya dari Ulama-ulama baik dari banjarmasin maupun luar pulau jawa Hanya sebatas PNS. Belum disosialisasikan ke lembaga pendidikan berlaku sejak masa kepemimpinan Pa Zairullah yaitu 2003 – 2010.

Di era kepemimpinan Bapak Mardhani dengan lahirnya Perda Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan oleh Bupati H. Sudiannor dengan program satu desa satu hafizh. Akan tetapi program ada kontra dari sebagian masyarakat dan tokoh politik di DPRD. Alasan mereka program ini tidak efektif untuk dijadikan sebuah perda (peraturan daerah)

Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa implementasi motto bersujud ini belum terlaksana secara maksimal. Padahal motto sangat bagus untuk diimplementasikan. Disertasi Tata Sukayat, *Internalisasi Nilai Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi Terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)*, (UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2015). Penelitian ini merupakan dengan metode kualitatif penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang implementasi nilai ajaran Islam ke dalam kebijakan publik. Masuknya nilai-nilai keislaman dalam kebijakan publik berupa peraturan daerah, dan kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai keislaman berupa religius, akhlak dan peribadatan. Hasilnya nilai-nilai keislaman yang terdapat pada kebijakan publik dapat menjadi bagian salah satu strategi dalam pengembangan dan pembinaan masyarakat Bandung.

Kabupaten Tanah Bumbu berdiri tahun diantaranya belum tersampainya pesan-pesan nilai-nilai yang terdapat pada motto tersebut di masyarakat. Realita yang dapat dilihat di masyarakat banyaknya anak remaja yang suka hidup glamor dan berfoya-foya, tawuran di kalangan pelajar. Bahkan berdasarkan berita di media massa, Kabupaten Tanah Bumbu ranking ke-2 angka pencurian kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan.

Implementasi nilai bersujud dalam sebuah kebijakan hendaknya disesuaikan dengan kepentingan masyarakat yang ada, jika sudah sesuai dilihat juga apakah itu memang diperlukan oleh masyarakat. Karena tidak semua program yang dicanangkan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Tujuannya masyarakat mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur bersujud dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi prosesnya tidak semudah yang dikehendaki, terlebih terjadinya pro dan kontra di tengah masyarakat.

Yadi Ruyadi mengatakan bahwa nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki kelompok masyarakat di Indonesia sudah merupakan milik bangsa sebagai potensi yang tak ternilai harganya untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai local wisdom-nya. Oleh karena itulah bersujud merupakan produk lokal yang diangkat oleh masyarakat setempat sebagai nilai yang ingin dikembangkan oleh masyarakat.

Konsep ini dilandasi oleh teori CDA yang mengatakan bahwa: Kebijakan dalam bentuk bahasa simbol yang melahirkan makna akan mampu menyusun dan mengubah dunia sosial. Karena bahasa adalah alat menggerakkan dan mereproduksi realitas sosial. Artinya bahwa motto daerah merupakan argumen pemerintah, sekaligus merupakan alat pembenaran yang dapat memberikan motivasi bagi orang lain untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk wacana yang terstruktur, berpola untuk dilaksanakan.

Sebenarnya motto atau semboyan telah banyak digunakan dalam masyarakat, terutama sebuah organisasi, perusahaan, kegiatan dan dalam pemerintahan. Fungsi semboyan daerah menurut Peraturan Pemerintah RI No. 77 Tahun 2017: “Desain logo daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah, serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut”. Tata nilai yang terdapat pada motto daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah bersujud. Jika diamati secara seksama, motto Bersujud merupakan hasil dari prosedur, proses dan produk. Dalam konteks pendidikan, Bersujud merupakan nilai-nilai akhlak yang secara prosedural hukum dituangkan dalam sebuah Peraturan Daerah. Motto daerah ini diimplementasikan secara resmi melalui Peraturan

Daerah (Perda) Nomor 26 Tahun 2005 tentang Lambang/Logo Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Simpulan

Motto daerah bersujud merupakan produk pemerintahan zaman Zairullah Azhar selaku Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat motto tersebut adalah melalui tiga kepemimpinan Zairullah, Mardhani dan H. Sudiannor dengan perbedaan gaya dan produk hukum. Masyarakat belum merespon dengan baik dan mengimplementasikan nilai-nilai bersujud dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin, Pendidikan Islam dan Tantangan Globalisasi, Yogyakarta; Ar Ruzz Media, 2004.
- Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- Assegaf, Abdurrahman Assegaf, Pendidikan Islam di Indonesia, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Aslan, Agus Setiawan, and Hifza. “Peran Pendidikan Dalam Merubah Karakter Masyarakat Dampak Akulturasi Budaya Di Temajuk.” FENOMENA: Jurnal Penelitian 11, no. 1 (2019): 11–30. <https://doi.org/10.21093/fj.v11i1.1403>.
- Buseri, Kamrani, Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam, cet ke - 2 Banjarmasin, IAIN Antasari Press, 2017.
- _____, Paradigma Pendidikan Islam; Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Pendidikan Islam, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2005.
- _____, Reinventing Pendidikan Islam; Menggagas Kembali Pendidikan Islam Yang Lebih Baik, Banjarmasin: Antasari Press, 2010
- Badan Statistik Kabuoaten Tanah Bumbu, 2010
- Bogdan, R. SJ. Taylor, Introduction to Qualitative Reseachr Method, (New York: John Wiley, 1975
- Creswell, John W. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, edisi terjemahan Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Dunn, William N., Public Policy Analysis an Introduction, Canada; Pearson Education, 2007.
- Elmubarak, Zaim, Membumikan Pendidikan Nilai, Bandung: Alfabeta, 2009
- Fattah, Nanang, Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Flower P, A.J. Smith, Interpretative Phenomenological Analysis Theory, Method, and Research, London, Sage Publications, 2009
- Gunawan, Ary H, Kebijakan Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta: 1995
- Huda, Ni'matul, Otonomi Daerah; Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematikanya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Irianto, Yoyon Bahtiar, Kebijakan Pembaruan Indonesoia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Jalal, Fasli, Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jakarta: Bappenas-Depdiknas-Adicita Karya Nusa, 2001
- Mahfud, Choirul, Politik Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2011.
- Muhaimin, et.al. Paradigma Pendidikan Islam; Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2001.

- Moleong, Lexy J. Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya: 2000
- Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan; Dari Filosofi ke Implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ruyadi, Yadi, *Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifian Budaya Lokal (Hasil Penelitian)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Setiawan, Agus. “Kajian Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam Tinjauan Historis Sosiologi, Politis, ekonomis dan Manajemen Negara.” *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (December 1, 2018): 253–275.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tilaar, H.A.R., Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan; Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.
- Media Center Tanah Bumbu, *Pengembangan Rumah Tahfidz Quran Rencananya Akan-dibuatkan Perda*, <http://mc.tanahbumbukab.go.id> diakses 31 Januari 2019 jam 20.00 Wita.
- Koran lokal <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/02/17/duh-tanbu-peringkat-dua-angka-curanmor-di-kalsel-kepolres-pencuri-manfaatkan-pemiliknya>